



## ARTIKEL RISET

URL artikel: <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh4306>

### Analisis Kemampuan dan Kemauan Pasien PBPJ Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Dewi Agustina<sup>1</sup>, Alfi Rofifah Kusuma<sup>2</sup>,<sup>K</sup>Putra Apriadi Siregar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email Penulis Korespondensi (<sup>K</sup>): [putraapriadisiregar@uinsu.ac.id](mailto:putraapriadisiregar@uinsu.ac.id)

[dewiagustina@uinsu.ac.id](mailto:dewiagustina@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [alfirofifahkusuma@gmail.com](mailto:alfirofifahkusuma@gmail.com)<sup>2</sup>, [putraapriadisiregar@uinsu.ac.id](mailto:putraapriadisiregar@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>  
(082198830067)

## ABSTRAK

Terjadi kenaikan iuran BPJS pada tahun 2020 sebesar 100% sementara itu Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJ) memiliki penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJ) memiliki masalah keuangan atas kenaikan iuran BPJS ini sehingga akan meningkatkan risiko Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJ) untuk berhenti menggunakan BPJS sebagai asuransi kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan kemauan membayar iuran pasien Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJ) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan design *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan pada bulan Agustus-Desember 2020. Sampel penelitian ini sebanyak 96 orang pasien Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPJ). Penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan *uji chi square*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden ATP I kategori mampu sebanyak 54.2%, ATP II non makanan kategori mampu sebanyak 74.0% dan non essential kategori tidak mampu sebanyak 65.6%. Kemauan membayar berdasarkan nilai WTP ketika iuran JKN naik dalam kategori tidak mau sebanyak 71.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kemampuan ATP II dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan ( $p=0.041$ ). Tidak ada hubungan antara kemampuan ATP I ( $p=0.776$ ) dan ATP III ( $0.0076$ ) dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.

Kata kunci : JKN; kemampuan membayar (ATP) ; kemauan membayar (WTP); PBPJ.

## Article history :

## PUBLISHED BY :

Public Health Faculty  
Universitas Muslim Indonesia

## Address :

Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 (Kampus II UMI)  
Makassar, Sulawesi Selatan.

## Email :

[jurnal.woh@gmail.com](mailto:jurnal.woh@gmail.com), [jurnalwoh.fkm@umi.ac.id](mailto:jurnalwoh.fkm@umi.ac.id)

## Phone :

+62 85397539583

Received 13 February 2021

Received in revised form 9 July 2021

Accepted 12 July 2021

Available online 25 July 2021

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



---

**ABSTRACT**

*There was an increase in BPJS contributions in 2020 by 100%; meanwhile, Non-Wage Recipient Workers (PBPU) have uncertain incomes every month. Non-Wage Recipient Workers (PBPU) have financial problems due to the increase in BPJS contributions to increase the risk of Non-Wage Recipient Workers (PBPU) stopping using BPJS as their health insurance. This study analyses the ability and willingness to pay patient contributions for non-wage workers (PBPU) of the National Health Insurance (JKN). This study uses quantitative research methods with a cross-sectional design. This research was conducted in the city of Medan to August-December 2020. The sample of this study was 96 patients of Non-Wage Recipient Workers (PBPU). This study used a questionnaire and analyzed using the chi-square test. This study indicates that the ATP I respondents in the capable category are 54.2%, the non-food ATP II in the capable category is 74.0%, and the non-essential category is 65.6%. Willingness to pay based on WTP value when JKN contributions increase in the unwilling category by 71.9. This study indicates a relationship between the ability of ATP II and the willingness to pay for JKN at the Sufina Aziz General Hospital, Medan City ( $p = 0.041$ ). There is no relationship between the ability of ATP I ( $p=0.776$ ) and ATP III (0.0076) with the willingness to pay for JKN at Sufina Aziz General Hospital Medan City.*

*Keywords: JKN; ability to pay (ATP); willingness to pay (WTP); non-receiving wage workers.*

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 216 juta dimana sebanyak 70 hingga 80 juta penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan padahal pemerintah berharap peserta BPJS kesehatan sebanyak mungkin.<sup>1</sup> Saat ini hanya sekitar 50% peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan sisanya hanya mendaftar kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat membutuhkan pelayanan atau ketika sudah jatuh sakit dan biasanya penyakit yang dialami merupakan penyakit katastropik, penyakit yang membutuhkan biaya yang cukup besar.<sup>1</sup> Banyak warga yang tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan, walaupun warga mengetahui mereka memiliki potensi, warga seperti ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai dirinya jika menderita sakit.<sup>2</sup>

Cakupan kepesertaan pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Indonesia pada bulan Desember tahun 2017 yaitu terdapat 25.397.828 jiwa. Untuk jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di wilayah Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh terdapat 1.785.761 jiwa atau sebanyak 98.72% pada tahun 2017. Untuk jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan Cabang Kota Medan pada tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 adalah sebanyak 609.096 jiwa/peserta.<sup>3</sup>

Mulai bulan April, Mei dan Juni 2020 iuran peserta program JKN-KIS mengikuti Perpres No. 82 tahun 2018 yaitu Rp. 80.000 untuk kelas I, Rp. 51.000 untuk kelas II dan Rp. 25.500 untuk peserta kelas III. Per 1 Juli 2020 iuran JKN-KIS bagi peserta mandiri disesuaikan menjadi Rp. 150.000 untuk peserta kelas 1, Rp. 100.000 untuk kelas II, dan Rp. 42.000 untuk peserta kelas III, namun demikian pemerintah memberikan subsidi bagi peserta kelas III sebesar Rp. 16.500 sehingga bagi peserta mandiri kelas 3 tetap akan membayar iuran sebesar Rp. 25.500/orang/bulannya. Kenaikan 100% premi BPJS Kesehatan pada tahun 2020 ini merupakan salah satu faktor pendorong untuk mengetahui bagaimana *Ability To Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) terhadap peserta Pekerja Bukan

Penerima Upah Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini untuk mengetahui seberapa mampu dan seberapa mau masyarakat dalam membayar premi atau iuran BPJS Kesehatan, terutama bagi pengguna jasa pelayanan rumah sakit.

Kemampuan membayar dan kemauan membayar merupakan aspek yang berfungsi dalam pemanfaatan jasa medis yang akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Kemampuan membayar bisa diukur dengan cara menjumlahkan pemasukan keluarga, pengeluaran rumah tangga, ataupun peninggalan keluarga.<sup>4</sup> Kemauan membayar dapat diukur dengan menanyakan kepada seseorang melalui dua cara yaitu berapa pengeluaran riil individu/keluarga untuk kesehatan dalam waktu tertentu dan dengan menanyakan langsung kepada suatu individu berapa biaya (rupiah) yang sanggup untuk dikeluarkan guna mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.<sup>5</sup>

Mayoritas warga berasumsi uang yang diperoleh (pemasukan utama ataupun bonus) lebih mengutamakan serta mengedepankan biaya keperluan sehari-hari dan tidak memprioritaskan biaya kesehatan.<sup>6</sup> Pendapatan keluarga juga sangat mempengaruhi seseorang dalam membayar biaya pelayanan kesehatan, jika seseorang tersebut memiliki pendapatan yang masih kurang maka orang lain (baik tenaga kesehatan ataupun lainnya) menganggap bahwa seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pelayanan kesehatan.<sup>7</sup> *Willingness to Pay* terhadap iuran JKN dipengaruhi beberapa faktor seperti pendapatan, informasi tentang JKN, ketersediaan fasilitas dan kemampuan membayar (ATP).<sup>8,9</sup>

Kenaikan 100% premi BPJS Kesehatan pada tahun 2020 ini merupakan salah satu faktor pendorong untuk mengetahui bagaimana *Ability To Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) terhadap pengunjung ataupun pasien peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini untuk mengetahui seberapa mampu dan seberapa mau masyarakat dalam membayar premi atau iuran BPJS Kesehatan, terutama bagi pengguna jasa pelayanan rumah sakit.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan pada bulan Agustus hingga Desember tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang berkunjung di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan, baik rawat inap ataupun rawat jalan pada saat penelitian ini dilaksanakan. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 96 pasien Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan jenis *non random sampling* dengan teknik *accidental sampling* pada pasien PBPU JKN.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner terstruktur yang sudah dipersiapkan. Data sekunder didapatkan dari BPJS Kesehatan Kota Medan dan data Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Medan. Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis *univariat* yang akan menggambarkan distribusi frekuensi dari

setiap variabel dan uji *bivariate* dilakukan dengan membuat tabulasi silang antara kemampuan membayar dan kemauan membayar pasien Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kemudian akan dilakukan uji *chi square*.

## HASIL

Tabel 1. Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran Pasien PBPU JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan

Variabel	n	%
Pendapatan (Rp)		
< 3.400.000,-	53	55.2
≥ 3.400.000,-	43	44.8
Pengeluaran Makanan (Rp)		
< 1.600.000,-	59	61.5
≥ 1.600.000,-	37	38.5
Pengeluaran Non Makanan (Rp)		
< 1.000.000,-	56	58.3
≥ 1.000.000,-	40	41.7
Pengeluaran Non Essensial (Rp)		
< 500.000,-	48	50.0
≥ 500.000,-	48	50.0

Hasil penelitian Tabel 1 diketahui bahwa hasil dari pendapatan per bulan responden terbanyak yaitu <Rp. 3.400.000,- sebanyak 55.2%, pengeluaran makanan responden terbanyak adalah <Rp. 1.600.000,- sebanyak 61.5%, pengeluaran non makanan terbanyak adalah <Rp. 1.000.000,- sebanyak 58.3%, dan pengeluaran non essensial memiliki hasil yang sama yaitu <Rp. 500.000,- sebanyak 50.0% dan ≥500.000,- sebanyak 50.0%.

Tabel 2. Distribusi Kemampuan (*Ability To Pay*) dan Kemauan Membayar (*Willingness to Pay*) Pasien PBPU JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan

Variabel	n	%
ATP I( <i>Ability To Pay</i> )		
Tidak Mampu	44	45.8
Mampu	52	54.2
ATP II ( <i>Ability To Pay</i> ) Non Makanan		
Tidak Mampu	25	26.0
Mampu	71	74.0
ATP II ( <i>Ability To Pay</i> ) Non Essensial		
Tidak Mampu	63	65.6
Mampu	33	34.4
<i>Willingness to Pay</i> (WTP) ketika tarif iuran naik		
Tidak Mau	69	71.9
Mau	27	28.1

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa hasil pada variabel independen ATP 1 yang mampu membayar iuran sebanyak 54.2%, ATP 2 non makanan yang mampu membayar iuran sebanyak 74.0% dan ATP 2 non essensial yang mampu membayar iuran sebanyak 34.0%. Sedangkan kemauan membayar yaitu pada WTP normatif atau kelas pelayanan yang diinginkan adalah kelas 3 sebanyak 87.5%, dan WTP aktual atau tarif yang seharusnya dibayar yaitu terdapat pada kelas 3 juga sebanyak

64.7%. Kemauan membayar ketika tarif iuran naik (WTP) responden masih banyak yang tidak mau yaitu sebanyak 71.9%.

Tabel 3. Hubungan antara ATP I, ATP II dengan WTP pasien PBPU JKN Pasien di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan

ATP	WTP				Total		P
	Tidak Mau		Mau		n	%	
	n	%	n	%			
<b>ATP I</b>							
Tidak Mampu	31	32.3	13	13.5	44	45.8	0.776
Mampu	38	39.6	14	14.6	52	54.2	
<b>ATP II (Non Makanan)</b>							
Tidak Mampu	22	22.9	3	3.1	25	26.0	0.041
Mampu	47	49.0	24	25.0	71	74.0	
<b>ATP II (Non Essensial)</b>							
Tidak Mampu	49	51.0	14	14.6	63	65.6	0.076
Mampu	20	20.8	13	13.5	33	34.4	

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa dari 44 orang (45.8%) responden yang memiliki ATP I dalam kategori tidak mampu ditemukan sebanyak 31 orang (32.3%) responden tidak mau membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 13 orang (13.5%). Responden yang memiliki ATP I dalam kategori mampu sebanyak 52 orang (54.2%) ditemukan sebanyak 38 responden (39.6%) yang tidak mau membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 14 orang (14.6%). Hasil uji *chi square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kemampuan ATP I dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 25 orang (26%) responden yang memiliki ATP II dalam kategori tidak mampu ditemukan sebanyak 22 orang (22.9%) responden tidak mau membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 3 orang (3.1%). Responden yang memiliki ATP II dalam kategori mampu sebanyak 71 orang (74%) ditemukan sebanyak 47 orang (49%) yang tidak mau membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 24 responden (46%). Hasil uji *exact fisher* menunjukkan bahwa terdapat hubungan kemampuan ATP II dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 63 orang (65.6%) responden yang memiliki ATP II *non essential* dalam kategori tidak mampu ditemukan sebanyak 49 orang (51%) responden tidak mau membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 14 orang (14.6%). Responden yang memiliki ATP II *non essential* dalam kategori mampu sebanyak 33 orang (34.4%) ditemukan sebanyak 20 orang (20.8%) yang tidak mau membayar JKN dan responden yang mau membayar JKN sebanyak 13 responden (13.6%). Hasil uji *chi square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kemampuan ATP II *non essential* dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.

## PEMBAHASAN

Membayar iuran jaminan kesehatan memerlukan peran serta masyarakat karena bergantung dengan *Willingness to Pay* (WTP). *Willingness to Pay* ataupun kemauan untuk membayar bisa dimaksud dengan uang yang hendak dibayarkan seorang pelanggan buat mendapatkan sesuatu benda ataupun pelayanan. Tingkat besar atau kecilnya WTP masyarakat dalam membayar iuran tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti pengeluaran dari keluarga dan pendapatan keluarga tersebut.<sup>10</sup>

Hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Sufina Aziz Medan bahwa responden yang berpendapatan rendah ikut serta program JKN ini ketika sudah membutuhkannya saja seperti ketika sudah terlanjur sakit dan tidak memiliki biaya untuk membayar biaya berobat ataupun biaya perawatan rumah sakit secara mandiri. Adapun dikarenakan pendapatan yang diperoleh tiap bulannya tidak tetap dikarenakan responden merupakan pekerja bukan penerima upah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sehingga mempengaruhi kemampuan membayar mereka. Semakin tinggi pendapatan maka mempengaruhi kemampuan membayar seseorang.<sup>11</sup>

Kemampuan responden PBPU JKN RSUD Sufina Aziz Kota Medan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan (program JKN) akan dipengaruhi oleh penghasilan tambahan sama halnya dengan pendapatan. Responden yang memiliki penghasilan tambahan berpendapat hal ini disebabkan karena penghasilan tambahan yang didapatkan tiap tahunnya tidak stabil dan lebih baik digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari lainnya daripada membayar biaya untuk pelayanan kesehatan, oleh karena itulah banyak responden yang mendaftar JKN (BPJS Kesehatan) ketika sudah sakit saja dan apabila sudah mendaftar tetapi tidak membayar iuran JKN (BPJS Kesehatan) ketika sudah membutuhkannya saja (sakit, bersalin dll).

Pengeluaran pada pasien PBPU JKN RSUD Sufina Aziz Kota Medan yaitu meliputi makanan pokok (beras), ikan, daging, telur, buah, bumbu, mie, serta konsumsi lainnya yang dihitung dalam satuan rupiah. Mayoritas peserta JKN di RSUD Sufina Aziz Kota Medan memiliki ATP I dalam kategori mampu namun masih banyak peserta JKN tidak mau membayar JKN di RSUD Sufina Aziz Kota Medan. Hasil uji *chi square* menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kemampuan ATP I dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.

Banyak masyarakat yang menginginkan manfaat dari JKN namun ketika disuruh melakukan pembayaran maka peserta JKN cenderung tidak mau membayar.<sup>10</sup> Nilai ATP tidak berhubungan dengan WTP, penghasilan peserta JKN yang tinggi ternyata tidak berhubungan dengan kemauan membayar JKN.<sup>12</sup> Kemampuan membayar iuran JKN akan dipengaruhi oleh pengeluaran keluarga baik itu pengeluaran dari jumlah anggota keluarga yang banyak maupun gaya hidup keluarga tersebut yang memberikan dampak terhadap ketidakmampuan keluarga dalam membayar iuran JKN.<sup>13</sup> Pengeluaran konsumsi biasanya dibelikan buat keperluan utama dalam rangka memberikan kebutuhan makan dan kebutuhan jasmani sebagai kebutuhan utama dalam pengeluaran konsumsi biasanya

dibelanjakan buat keinginan utama untukenuhi keinginan badan, konsumsi santapan ialah aspek terutama sebab santapan ialah tipe benda penting buat menjaga kesinambungan hidup.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran non makanan terbanyak yaitu pengeluaran untuk pembiayaan rumah sewa, listrik, air dan gas, hal ini disebabkan karena banyak responden yang masih menyewa rumah karena pendapatan yang belum mencukupi untuk membeli rumah, sedangkan untuk pembayaran listrik, air dan gas merupakan pengeluaran yang mesti dikeluarkan setiap bulannya sama halnya dengan keperluan sabun dan transportasi. Pengeluaran non makanan yang cukup besar yaitu pengeluaran untuk keperluan sabun dan transportasi, sedangkan pengeluaran non makanan yang paling sedikit yaitu pembiayaan untuk alat dapur, alat makan, dan telepon seluler. Hasil uji *exact fisher* menunjukkan bahwa terdapat hubungan kemampuan ATP II dengan kemauan membayar JKN di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz Kota Medan.

Kemampuan masyarakat dalam memenuhi pengeluaran non pangan akan berkaitan dengan kemauan membayar JKN. Masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi pengeluaran non pangan memerlukan bantuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk membayar JKN.<sup>14</sup> Pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan, perumahan dan rumah tangga akan berkaitan dengan kemampuan membayar iuran JKN.<sup>15,16</sup> Masih banyak masyarakat yang menganggap iuran JKN terlalu besar sehingga mereka lebih memprioritaskan pengeluaran rumah tangga dibandingkan mengalokasikan dana untuk membayar iuran JKN.<sup>17</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Sufina Aziz Medan dalam besarnya ATP I sebagian besar dapat membayar tarif dibandingkan dengan yang tidak mampu membayar, begitu juga dengan ATP II non makanan lebih banyak yang termasuk dalam kategori mampu. Berbeda dengan ATP II non esensial yang kebanyakan responden masuk kedalam kategori tidak mampu, akan tetapi jika dirata-ratakan maka pengeluaran esensial responden yaitu sebesar Rp. 490.521.

Banyak masyarakat miskin yang memiliki pengeluaran ATP II non esensial namun ketika pembayaran iuran JKN masih banyak yang menunggak atau tidak membayar.<sup>18</sup> Keluarga miskin yang memiliki pengeluaran rumah tangga yang tinggi memiliki keinginan untuk mengikuti JKN namun penghasilan yang rendah membuat mereka tidak mampu membayar iuran JKN namun jika pemerintah mau memberikan bantuan iuran JKN maka keluarga miskin bersedia mengikuti program JKN.<sup>19</sup>

Jika ATP lebih besar dari WTP berarti pengguna memiliki pendapatan yang besar tetapi pemanfaatan terhadap pelayanan medis menjadi berkurang. Hasil penelitian yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Hermanto bahwa hasil perhitungan *Ability to Pay* (ATP) terhadap pengemudi truk kontainer dapat melunasi iuran Rp. 25.500,- tetapi *Willingness to Pay* (WTP) hanya Rp. 5000 – Rp. 10.000,- setiap bulan untuk setiap orang.<sup>20</sup> Penghasilan masyarakat akan berdampak secara langsung terhadap kemauan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.<sup>21</sup>

Kemauan responden dalam membayar iuran yaitu cenderung lebih banyak yang tidak ingin membayar dibandingkan responden yang ingin membayar, hal ini disebabkan karena kenaikan tarif iuran 100% atau dua kali lipat dari sebelumnya sehingga cukup memberatkan dengan kondisi

pendapatan yang tidak menentu dan responden merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Selain itu alasan lainnya adalah ketika hendak digunakan saja baru membayar iuran karena uang yang ada lebih diutamakan untuk keperluan sehari-hari. Dan berdasarkan WTP normatif dan WTP aktual responden lebih banyak yang memilih pada kategori kelas 3 dengan alasan masih cukup terjangkau walaupun setelah kenaikan 100% kebanyakan responden yang sangat keberatan, oleh karena itu juga banyak responden yang mengajukan penurunan kelas kepada pihak BPJS Kesehatan, seperti dari kelas 2 turun menjadi kelas 3. Hasil penelitian Hardy tahun 2017 menunjukkan bahwa pasien kelas 3 menjadi golongan pasien yang memiliki kemauan pasien membayar (*Willingness to Pay*) paling besar.<sup>14</sup>

Masyarakat sebenarnya sangat mengharapkan bantuan pemerintah sebagai anggota peserta JKN-KIS atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) karena pendapatan yang tidak menentu dan merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Akan tetapi karena kondisi yang mendesak akhirnya kebanyakan responden mendaftar secara mandiri dengan iuran yang sudah ditetapkan. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tidak mampu sebenarnya mau melakukan pembayaran terhadap iuran JKN namun pekerjaan yang tidak menentu akan memberikan dampak terhadap pendapatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Ketidakmampuan responden karena kurangnya pendapatan dan banyaknya anggota keluarga yang menyebabkan banyaknya pengeluaran rumah tangga sehingga pengeluaran rumah tangga yang tinggi akan berdampak terhadap kemauan membayar iuran JKN.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki tingkat pendapatan <Rp.3.400.000,00 sedangkan untuk tingkat pengeluaran responden dengan rata-rata untuk makanan yaitu Rp.1.594.583, untuk non makanan yaitu Rp. 962.781 dan non essential yaitu Rp. 490.521. Jenis pengeluaran yang paling besar dikeluarkan oleh responden yaitu untuk pengeluaran makanan.

Responden dalam penelitian ini memiliki ATP 1 terbanyak pada kategori mampu sebanyak 54.2% dengan rata-rata ATP setiap orang sebesar Rp. 96.109 per bulan. Untuk ATP 2 berada pada kategori mampu untuk non makanan yaitu sebanyak 74.7 % dengan rata-rata ATP sebesar Rp. 47.566 dan untuk non essential terbanyak berada pada kategori tidak mampu sebanyak 65.6 % dengan rata-rata ATP sebesar Rp. 25.021.

Kemauan membayar (*Willingness to Pay*) normatif terbanyak berada pada kategori kelas 3 JKN yaitu sebanyak 87.5 % dengan rata-rata setiap orang sebesar Rp. 37.604 per bulan. Untuk WTP aktual terbanyak berada pada kategori kelas 3 JKN yaitu sebanyak 66.7 % dengan rata-rata setiap orang sebesar Rp. 55.359 per bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan ATP responden lebih besar dari pada WTP. Kemauan Membayar (*Willingness to Pay*) berdasarkan kenaikan tarif iuran terbanyak berada pada kategori tidak mau sebanyak 71.9%.

Untuk seluruh masyarakat pengguna pelayanan kesehatan, khususnya kepada pasien Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) JKN RSU Sufina Aziz lebih baik untuk mengurangi pengeluaran

rumah tangga non esensial untuk dapat membayar iuran JKN. Masyarakat yang menjadi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) JKN yang tidak sanggup membayar iuran JKN diharapkan mengajukan bantuan pembiayaan iuran JKN melalui program JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI).

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih banyak kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan dan terimakasih banyak atas dukungan semua pihak, baik kedua orang tua, sahabat, teman, keluarga, bapak/ibu dosen dan seluruh staff FKM UIN Sumatera Utara Medan.

### DAFTAR PUSTAKA

1. BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.; 2019.
2. Abadi MY. Analisis Kepesertaan Mandiri BPJS Kesehatan Di Sektor Informal (Studi Di Kota Makassar). *J Manaj Kesehat Yayasan RS Dr Soetomo*. 2019;5(2):114-124.
3. BPJS Kesehatan Kota Medan. Laporan Pengelolaan Program Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.; 2019.
4. Ahmad F et all. Willingness- To-Pay For Community-Based Health Insurance Among Informal Workers In Urban Bangladesh. *J Public Heal Clin Sci*. 2017;4(4):154-163.
5. Razak A. The Pay Ability and Willingness to Pay for Treatment at Pangkajene Hospitals. *Indian J Public Heal Res Dev*. 2019;10(4):845-850.
6. Marzuki. D. S. Analisis Kemampuan Membayar Dan Kemauan Membayar Peserta PBPU JKN Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *J Manaj Kesehat Yayasan RS Dr Soetomo*. 2019;5(2):102-113.
7. Mudayana. A. A. Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Pasien Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah Bantul. *KesMas J Fak Kesehat Masyarakat*. 2015;9(1):44-52.
8. Yuniarti AD. Willingness To Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pedagang Di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Timbangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Published online 2018.
9. Babatunde O. Willingness-To-Pay For Community Based Health Insurance by Farming Households: A Case Study Of Hygeia Community Health Plan In Kwara State, Nigeria. *J Sci*. 2016;14(3):281-286.
10. Karimah. Ability dan willingness to pay pekerja kerajinan tangan terhadap iuran jaminan kesehatan nasional di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Published online 2015.
11. Sihaloho. E. N. Determinan Kemauan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang. Published online 2015.
12. Pratiwi. Analisis Kemampuan (ATP) dan Kemauan (WTP) Membayar Premi BPJS Kesehatan Pekerja oleh Pemilik UKM di Pertokoan Tekstil di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. *J Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*. 2016;1(2):1-10.
13. Hildayanti AN. Determinan Ability To Pay dan Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar). *Promot J Kesehat Masy*. 2020;10(2):130-137.
14. Hardy. I. Kemauan dan Kemampuan Membayar (Ability – Willingness to Pay) dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Sektor Informal Pedagang Pasar Tradisional di

- Kota Denpasar. *J Kesehat Terpadu*. 2017;2(2):96-100.
15. Sahriana. A. Analisis Kemampuan Membayar (Ability To Pay) Dan Kemauan Membayar (Willingness To Pay) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Masyarakat Di Pulau Lakkang Kota Makassar Tahun 2017. Published online 2017.
  16. Nurbaeti N. Kemampuan Membayar Iuran Bpjs Bagi Masyarakat Pekerja Sektor Informal (Studi Pada Tukang Ojek Dan Becak/Bentor). *Promot J Kesehat Masy*. 2019;8(2):65-72.
  17. Hasibuan R. Gambaran Respon Peserta JKN Mengenai Kenaikan Premi Pada Dua Puskesmas Kota Medan Tahun 2019. *Contag Sci Period Public Heal Coast Heal*. 2019;1(2):108-120. doi:10.30829/contagion.v1i2.7245
  18. Nainggolan AR. Ability dan Willingness to Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Nelayan di Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Tahun 2019". Published online 2020.
  19. Putra. Analisis Ability to Pay dan Catastropic Payment pada Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Makassar. Published online 2014.
  20. Hermanto. A. S. Kesiapan Pekerja Sektor Informal (Sopir Truk Kontainer) dalam Membayar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Semarang. *Visikes J Kesehat Masy*. 2015;2(13):1-10.
  21. Rismawati, R. Factors Related With Compliance Paying Of Bpjs Mandiri Insurance/Contribution In The Working Area Of Batalaiworu Public Health Center In 2017. *J Ilm Mhs Kesehat Masy*. 2017;2(8):1-10.